

## SOSIALISASI POLITIK PARTAI ACEH KEPADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Muhammad Afif Khairullah

NPP. 31.0020

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*

*Program Studi: Politik Indonesia Terapan*

Email: [mhmmdafkh@gmail.com](mailto:mhmmdafkh@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si.

### ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research was motivated by problems in the community in Banda Aceh City regarding understanding and awareness of the importance of Political Education in Banda Aceh City, Aceh Province. This problem is the main target and focus for local parties in Aceh to build awareness among the people of Aceh, especially in the city of Banda Aceh, so that they have political understanding. Purpose:* *The aim of this research is to examine and find out the role of political parties in Aceh in providing political socialization in Banda Aceh City, Aceh Province and to find out the supporting and inhibiting factors during the implementation of socialization. Method:* *This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Result:* *From the results of this research, it can be concluded that the role of the Aceh Party in providing political education in the city of Banda Aceh has been running well based on factual and ideal dimensions, but is still Not optimal from a Normative perspective because there is still a lack of quality education for Aceh party cadres or members. Apart from that, the obstacles encountered meant that the program and process, namely in terms of regional access, quality of human resources and the limited planned budget, did Not run as expected. Conclusion:* *This research concludes that the Aceh Party has carried out political outreach in accordance with the law, but it has not been optimal due to the low education of some of its members. Strong support comes from the enthusiasm and commitment of party members, as well as the underlying legality. The main obstacles include difficult access to remote villages, limited budgets, and low quality of human resources, both among cadres and communities who have a negative view of politics. Suggestions for the Aceh Party include increasing political outreach to the younger generation, improving the quality of human resources through internal discussions, and looking for alternative funding sources other than the government.*

**Keywords:** *Aceh Party, Education, Politic*

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Permasalahan di masyarakat di Kota Banda Aceh mengenai pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Sosialisasi politik Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Permasalahan ini menjadi target serta fokus utama bagi Partai lokal di Aceh untuk membangun kesadaran kepada masyarakat aceh terkhusus di Kota Banda Aceh agar memiliki pemahaman politik. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana peran partai politik di*

aceh dalam memberikan Sosialisasi politik di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan sosialisasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Partai Aceh dalam memberikan Sosialisasi politik di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik yang didasarkan oleh dimensi faktual dan ideal namun masih belum optimal dari segi Normative karena masih kurangnya kualitas Pendidikan kader ataupun anggota Partai Aceh yang masih belum cukup, disamping itu adanya hambatan yang ditemui membuat program serta prosesnya yaitu dari segi akses wilayah, kualitas SDM serta Anggaran yang terbatas direncanakan tidak berjalan sesuai diharapkan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai Aceh telah melakukan sosialisasi politik sesuai dengan undang-undang, namun belum maksimal karena rendahnya pendidikan sebagian anggotanya. Dukungan kuat datang dari semangat dan komitmen anggota partai, serta legalitas yang mendasarinya. Kendala utama termasuk sulitnya akses ke desa-desa terpencil, anggaran terbatas, dan kualitas SDM yang rendah, baik di kalangan kader maupun masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap politik. Saran untuk Partai Aceh meliputi peningkatan sosialisasi politik kepada generasi muda, peningkatan mutu SDM melalui diskusi internal, dan mencari sumber pendanaan alternatif selain dari pemerintah.

**Kata kunci:** *Partai Aceh, Politik, Sosialisasi*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Partai politik merupakan suatu wadah yang menyambungkan antara aspirasi masyarakat agar terlibat dan berpartisipasi dalam kedaulatan dan demokrasi. Partai politik berperan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dengan adanya partai politik, aspirasi masyarakat dapat didengar dan diperjuangkan oleh para wakil rakyat di parlemen (Muslimin, 2019). Partai politik yang demokratis dan kuat mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan efektif, karenanya ini memberi kesempatan terhadap masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Arniti, 2020).

Partisipasi politik memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi. Konstitusi memberikan tanggung jawab kepada partai politik sebagai suatu tatanan dan tanggung jawab sehingga menjadi aspek penting untuk mewujudkan adanya modernisasi politik. Konstitusi memberikan landasan hukum bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya dan memberikan batasan-batasan terhadap partai politik agar berjalan secara demokratis serta transparan. Adanya legitimasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga dipengaruhi oleh partisipasi politik (Clara et al., 2022). Dalam menjalankan tugasnya, partai politik harus memiliki komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi serta memberikan tanggapan. Komunikasi dua arah ini tentunya memberikan kepercayaan masyarakat kepada pihak yang dijadikan sebagai perwakilan. Partai politik akan menjalankan tugasnya dengan efektif apabila memperoleh dukungan baik dari dalam dan luar, dari skala besar maupun kecil, dari tingkat lokal atau daerah hingga ke tingkat nasional (Zulkarnaen et al., 2020).

Di Kota Banda Aceh, Partai Aceh menggelar sosialisasi politik melalui program sosialisasi tentang bagaimana menyikapi partai politik terkait fenomena apa yang masih berlangsung. Kebanyakan rakyat yang enggan melakukan partisipasi politik karena mereka masih menganggap

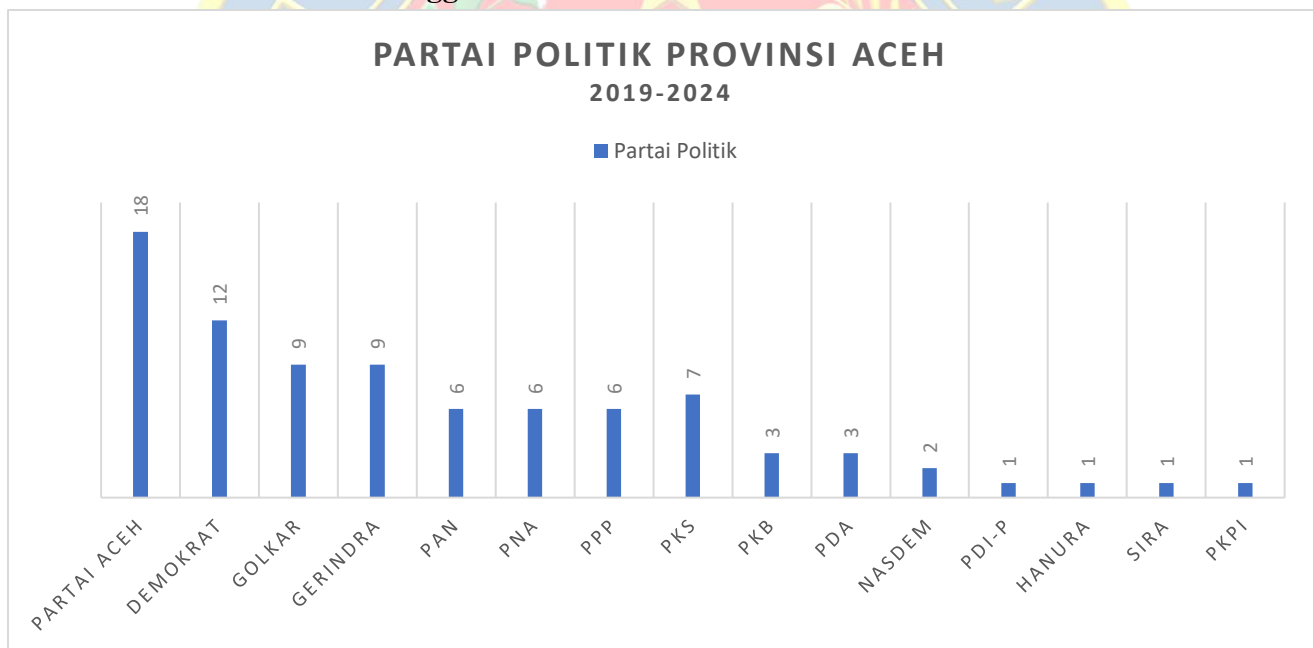
politik dengan konotasi negatif. Konotasi negatif tersebut dapat berupa politik sering dikaitkan dengan korupsi. Masyarakat menganggap bahwa politik adalah arena bagi orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak jujur. Politik sering dikaitkan dengan kekerasan. Politik sering dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (Musrafiyan et al., 2021).

Kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Masyarakat perlu menyadari bahwa politik adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik adalah media guna mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakat (Alfarizi et al., 2021).

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan politik di Provinsi Aceh. Gambar berikut merupakan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

**Gambar 1. 1**  
**Anggota DPRA Provinsi Aceh 2019-2024**



Sumber: (dpra.acehprov.go.id, 2020.)

Partai Aceh merupakan salah satu partai yang sangat mendominasi kedudukan ke bangku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Terbukti dari Pemilu mulai Tahun 2019 Partai Aceh mampu menjadi penyumbang kursi terbanyak. Pada tahun 2019 Partai Aceh mampu menduduki 18 kursi. Hal tersebut menjadikan Partai Aceh bertugas penting pada menggelar sosialisasi politik untuk seluruh rakyat yang ada di Aceh. Partai Aceh juga sering memberikan Sosialisasi politik seperti pengetahuan tentang Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Demokrasi juga hal-hal yang memiliki sejarah berdirinya Partai Aceh dan juga memberikan pengertian terkait dengan kepemimpinan kepada calon yang akan berpartisipasi ke dunia politik.



Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh sendiri masih banyak yang tidak memanfaatkan hak pilih suaranya. Berdasarkan data yang diambil dari surat keputusan KIP BANDA ACEH NO. 72 TAHUN 2019 Dari total 170 ribu yang memiliki hak suara untuk memilih hanya 116 ribu yang menggunakan hak pilih suaranya dalam Pemilu DPRK di Kota Banda Aceh tahun 2019. Masih terdapat 53 ribu masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak menggunakan hak pilih suaranya dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Bisa disimpulkan bahwasannya, masyarakat di Kota Banda Aceh masih banyak yang belum memahami pentingnya sosialisasi politik sehingga masih banyak yang tidak memakai hak pilih suaranya pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan sosialisasi partai politik. Penelitian M. Fahrudin Andriyansyah yang berjudul "Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh" hasil penelitian menunjukkan bahwa, Partai politik lokal telah berperan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menginisiasi Pembentukan Partai Politik Lokal di daerah lain atau di Provinsi lain (Andriyansyah, 2020). Penelitian Ade Setiadi, Wiji Febriyani Rizkiyah, Rizki Rahmah Fauzia yang berjudul "Efektivitas Sosialisasi Politik: Studi Tentang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Indramayu" hasil penelitian menunjukkan bahwa, langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indramayu yaitu meningkatkan daya tarik kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat hadir ketika ada acara sosialisasi sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih paham tentang regulasi dan tahapan Pemilu atau Pilkada dan ketika hari pemilihan tiba masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan; menyisir segmentasi pemilih agar waktu pelaksanaan sosialisasi menjadi lebih efektif; perekrutan relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi dan terjalannya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara KPU sebagai penyelenggara dengan pemerintah, partai politik, stakeholder, dan media (Setiadi et al., 2022). Penelitian Eka Yulyana, Nelly Martini, dan Arip Solehudin yang berjudul "Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Bagi Penyandang Disabilitas", hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih rendahnya perhatian yang diberikan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam hal partisipasi politik, tidak pernah secara langsung kegiatan sosialisasi sampai pada level akar rumput, sehingga kegiatan ini dirasakan sangat membantu peran pemerintah dan penyelenggara pemilu yang hanya melakukan satu kali sosialisasi pilkada untuk penyandang disabilitas yang hanya melalui komunitas penyandang disabilitas (Yulyana et al., 2021). Penelitian Irma Irayanti, I pandang, Ahmadi, Maulana Malik Ibrahim, dan Abdul Wahid yang berjudul "Sosialisasi Pendidikan Demokrasi pada Pemilih Pemula" hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sosialisasi yang dilakukan merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama kalinya (Irayanti et al., 2022). Terakhir, penelitian Maharani Syahfitri dan Al Rafni yang berjudul "Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang)" hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Padang, layanan kunjungan secara langsung, Sosialisasi KPU Goes To School atau KPU Goes To Campus. Terdapat beberapa kendala dalam sosialisasi tersebut diantaranya kekurangan

sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya minat masyarakat yang rendah untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (Syahfitri & Rafni, 2021).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Sosialisasi Politik menurut Ramlan Surbakti yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, Pelembagaan, Struktur Fungsional, dan Pembelajaran Sosial (Surbakti, 2013).

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana peran partai politik di Aceh dalam memberikan Sosialisasi politik di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan sosialisasi.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap delapan informan yang terdiri dari, Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, Sekretaris Kesbangpol, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Ketua Umum Partai Aceh, Ketua Departemen Pembinaan Wilayah dan Organisasi Underbow Partai Aceh, dan Masyarakat Kota Banda Aceh sebanyak tiga orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Sosialisasi Politik Partai Aceh Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Provinsi Aceh**

##### **3.1.1. Pelembagaan**

Pelembagaan dalam teori institusi adalah konsep kunci dalam memahami peran berbagai lembaga dalam proses sosialisasi politik masyarakat. Di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, peran lembaga-lembaga seperti partai politik, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam analisis peran Partai Aceh. Partai politik, seperti Partai Aceh, memiliki tanggung jawab penting dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Partai ini berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang visi, misi, dan program-program politiknya, yang berhubungan dengan pembentukan identitas politik masyarakat. Untuk itu, Partai Aceh dapat menggunakan berbagai strategi sosialisasi politik, seperti kampanye, diskusi publik, seminar, dan pelatihan politik.

Media massa juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan informasi politik dan memengaruhi opini publik. Partai Aceh dapat berkolaborasi dengan media massa untuk



meningkatkan visibilitas dan pemahaman tentang agenda politiknya melalui debat politik, wawancara, dan liputan mendalam tentang isu-isu politik lokal. Lembaga pendidikan memegang peran penting dalam sosialisasi politik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan partisipasi aktif dalam proses politik. Partai Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan memberikan pelatihan bagi guru-guru tentang penyampaian materi politik secara objektif. Lembaga keagamaan, terutama di Aceh di mana Islam memiliki pengaruh kuat, juga berperan dalam menyampaikan nilai-nilai politik yang sesuai dengan ajaran agama. Partai Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk menyampaikan pesan politik yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan moralitas, serta memberdayakan ulama dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi politik.

Kesimpulannya, pelembagaan dalam teori institusi menunjukkan pentingnya peran partai politik, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan dalam sosialisasi politik di masyarakat. Partai Aceh di Kota Banda Aceh harus memanfaatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga ini untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat.

### **3.1.2 Struktural Fungsional**

Dimensi Struktural-Fungsional dalam sosialisasi politik mencakup proses internalisasi nilai-nilai politik, pemahaman terhadap norma-norma politik, dan kesadaran akan peran-peran politik dalam masyarakat. Dalam konteks Partai Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dimensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan dan partisipasi politik masyarakat. Internalisasi nilai-nilai politik melibatkan proses penerimaan dan penghayatan nilai-nilai politik sebagai bagian integral dari budaya politik masyarakat. Partai Aceh dapat menyampaikan nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan identitas lokal Aceh melalui diskusi publik, seminar, dan kampanye. Kegiatan ini, ditunjang dengan ceramah dan literatur politik, memungkinkan internalisasi nilai-nilai politik secara efektif, terutama jika ada konsistensi antara retorika politik dan praktik politik.

Pemahaman dan pengakuan terhadap norma-norma politik juga penting. Norma-norma politik mengatur perilaku politik, seperti etika, keterbukaan, dan akuntabilitas. Partai Aceh dapat memperkuat pemahaman ini melalui pembinaan internal, pelatihan etika politik bagi kader, dan kampanye untuk mendorong partisipasi politik yang etis. Kesadaran akan peran yang diharapkan dari aktor politik adalah aspek krusial lainnya. Masyarakat perlu memahami peran dan tanggung jawab pemimpin politik, legislator, dan partai politik. Partai Aceh dapat mengedukasi masyarakat tentang struktur pemerintahan, fungsi lembaga-lembaga politik, dan mekanisme partisipasi politik melalui program pelatihan kepemimpinan, pembangunan kapasitas, dan advokasi politik.

Dengan memanfaatkan dimensi Struktural-Fungsional ini, Partai Aceh dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi politik masyarakat, memperkuat internalisasi nilai dan norma politik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran-peran politik yang diharapkan.

### **3.1.3. Pembelajaran Sosial**

Dimensi Pembelajaran Sosial dalam sosialisasi politik melibatkan pengamatan perilaku politik, peniruan perilaku politik, dan peran tokoh masyarakat dalam membentuk pola pikir dan tindakan politik masyarakat. Dalam konteks Partai Aceh di Kota Banda Aceh, dimensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan dan partisipasi politik. Pengamatan perilaku politik memungkinkan

masyarakat untuk memahami strategi politik, mendapatkan informasi tentang isu-isu politik, dan mengidentifikasi kesalahan yang harus dihindari melalui observasi tindakan politik orang lain. Partai Aceh dapat memfasilitasi proses ini dengan mengadakan debat politik, seminar, atau forum diskusi, sehingga masyarakat dapat melihat berbagai pendapat dan strategi politik yang berbeda.

Peniruan perilaku politik adalah proses di mana masyarakat meniru perilaku politik yang dianggap efektif atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Partai Aceh dapat menjadi model bagi masyarakat dalam hal perilaku politik yang positif. Konsistensi dalam tindakan dan komunikasi politik yang transparan dari Partai Aceh dapat menginspirasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik dan mengadopsi prinsip-prinsip etis dalam perilaku politik mereka. Tokoh masyarakat atau public figure memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mengarahkan diskusi politik, dan memobilisasi massa untuk tujuan politik tertentu. Partai Aceh dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi dan pengaruh yang baik untuk memperkuat pesan politiknya. Kolaborasi dengan tokoh-tokoh ini dalam acara-acara politik, kampanye publik, atau kegiatan-kegiatan sosialisasi politik dapat membantu memperluas jangkauan pesan politik dan memperkuat dukungan dari berbagai segmen masyarakat.

Dengan memanfaatkan dimensi Pembelajaran Sosial ini, Partai Aceh dapat memperkuat dukungan dan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam dinamika politik, serta membentuk perilaku politik yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partai Aceh Dalam Memberikan Sosialisasi**

Dalam konteks sosialisasi politik oleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Faktor-faktor pendukung mencakup komitmen pengurus partai untuk menjalankan tugas sesuai UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kesadaran dan antusiasme kader dalam sosialisasi politik, legalitas kegiatan yang memberikan landasan hukum, serta keterikatan emosional antara Partai Aceh dan masyarakat Aceh. Keterikatan ini diperkuat oleh perjuangan Partai Aceh dalam menerapkan syariat Islam, yang meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Dari wawancara dengan berbagai pihak, termasuk Faisal Saifuddin dan Juanda Jamal dari DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh, terungkap bahwa komitmen partai untuk memberikan sosialisasi politik didorong oleh tujuan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan mencegah krisis kepercayaan. Program sosialisasi politik ini mencakup seminar, sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis, yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan politik generasi muda dan masyarakat secara umum. Antusiasme kader dalam menginisiasi dan melibatkan diri dalam kegiatan ini juga menonjol, menunjukkan dedikasi partai untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

Namun, pelaksanaan sosialisasi politik juga menghadapi sejumlah hambatan. Akses jalan yang sulit ke beberapa gampong di Kota Banda Aceh, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih minim, anggaran yang terbatas, dan jadwal kegiatan yang seringkali tidak sinkron menjadi tantangan signifikan. Wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk Rully Defriza dan Nurdahlina dari Kesbangpol Kota Banda Aceh, mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan internal partai dan persepsi negatif masyarakat terhadap politik juga menghambat efektivitas sosialisasi politik. Stigma masyarakat yang menganggap politik sebagai sesuatu yang negatif serta ekspektasi



bahwa kegiatan sosialisasi harus disertai dengan insentif material menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan sosialisasi politik oleh Partai Aceh, hambatan-hambatan yang ada menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala akses, meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memperbaiki relasi internal partai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi politik dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan yang bisa dijadikan diskusi terhadap perbandingan terhadap penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah peran Partai Aceh dalam memberikan Sosialisasi politik di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik yang didasarkan oleh dimensi faktual dan ideal namun masi belum optimal dari segi Normative karena masih kurangnya kualitas Pendidikan kader ataupun anggota Partai Aceh yang masih belum cukup, disamping itu adanya hambatan yang ditemui membuat program serta prosesnya yaitu dari segi akses wilayah, kualitas SDM serta Anggaran yang terbatas direncanakan tidak berjalan sesuai diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian M. Fahrudin Andriyansyah yang menunjukkan bahwa, Partai politik lokal telah berperan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menginisiasi Pembentukan Partai Politik Lokal di daerah lain atau di Provinsi lain (Andriyansyah, 2020). Kemudian penelitian dari Maharani Syahfitri dan Al Rafni yang menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Padang, layanan kunjungan secara langsung, Sosialisasi KPU Goes To School atau KPU Goes To Campus. Terdapat beberapa kendala dalam sosialisasi tersebut diantaranya kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya minat masyarakat yang rendah untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (Syahfitri & Rafni, 2021).

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai Aceh, sebagai partai politik di tingkat provinsi, telah melakukan sosialisasi politik sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum maksimal, terutama dalam dimensi normatif, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan sebagian anggotanya. Dukungan terhadap sosialisasi politik Partai Aceh ditunjang oleh semangat dan komitmen tinggi dari para anggota serta legalitas yang kuat, yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Partai Aceh, yang lahir dari masyarakat Aceh, juga memiliki keunggulan dalam menumbuhkan rasa memiliki dan tujuan bersama.

Namun, kendala utama yang dihadapi Partai Aceh dalam menjalankan misinya mencakup sulitnya akses dan kurangnya infrastruktur menuju desa-desa terpencil (gampong), anggaran yang terbatas, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah baik di kalangan kader maupun masyarakat, yang memiliki pandangan negatif terhadap politik. Selain itu, masalah internal partai juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan beberapa program sosialisasi politik.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran diberikan untuk meningkatkan peran Partai Aceh dalam sosialisasi politik. Pertama, disarankan agar Partai Aceh lebih intensif dalam memberikan



sosialisasi politik kepada generasi muda, khususnya pelajar, yang pengetahuan politiknya lebih mudah diarahkan. Kedua, Partai Aceh perlu meningkatkan mutu serta kualitas SDM dengan mengembangkan diskusi dua arah dalam internal partai guna menyelesaikan masalah internal, yang pada gilirannya akan memperlancar program sosialisasi politik. Ketiga, terkait dengan dana, Partai Aceh disarankan untuk tidak hanya bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah (PP No 83 Tahun 2012), tetapi juga mencari sumber pendanaan alternatif baik dari internal maupun eksternal partai.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh partai lokal di Aceh agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dan Ketua Umum Partai Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, I. F. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU*.
- Alfarizi, M. S., H, H., & H, H. (2021). Peran Partai Aceh Untuk Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 456–463. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6617>
- Andriyansyah, M. F. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh. *Yurispruden*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Clara, I., Lengkoan, J., Liando, D., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 2(1), 2022.
- dpra.acehprov.go.id. (2020). *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Adat Bak Po Teumeuruhom Hukom Bak Syiah Kuala*. Retrieved July 16, 2024, from <https://dpra.acehprov.go.id/>
- Irayanti, I., I pandang, I., Ahmadi, A., Ibrahim, M. M., & Wahid, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi pada Pemilih Pemula. *Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–166. <https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.814>
- Muslimin, K. (2019). *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Unisnu Press.
- Musrafiyan, M., Fahmi, M., & Karim, Z. P. (2021). Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11536>

- Rusli, Z., Yuliani, F., Sulistianingsih, E., & Sadad, A. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 59–141.
- Setiadi, A., Rizkiyah, W. F., & Fauzia, R. R. (2022). EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK: STUDI TENTANG MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN INDRAMAYU. *Cendekia Jaya*, 1–11.
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2013). *Memahami Ilmu Politik* (8th ed.). PT. Grasindo.
- Syahfitri, M., & Rafni. (2021). Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang). *Journal of Civic Education*, Vol.4(4), 354–362. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/576>
- Yulyana, E. K. A., Martini, N., Solehudin, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Manajemen, P. S., Teknik, P. S., & Barat, J. (2021). SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADATAHUN 2020 BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *Socialization of the 2020 Election for People with Disabilities*, 2(1), 108–115.
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>

